

**Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Kecamatan Malalayang****Oleh:****Marciano Febriant Rorong Massie <sup>1</sup>****Shirley Y.V.I. Goni<sup>2</sup>****Evelin J.R. Kawung<sup>3</sup>****Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Program Keluarga Harapan bagi pendidikan siswa kurang mampu di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Program Keluarga Harapan di jalankan atas pelaksanaan UU No. 40 Tahun tentang jaminan sosial, UU No. 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial, UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Impres No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Dalam prakteknya masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Materi Program Keluarga Harapan di harapkan dapat di gunakan sebagaimana dengan kebutuhan materi yg di gunakan anak sekolah dalam mengecap Pendidikan seperti pakaian, sepatu, dan perlengkapan lainnya, selain itu juga di harapkan masyarakat menyadari pentingnya kesehatan dan pendidikan, sehingga masyarakat kurang mampu dapat menyekolahkan anak dan dapat memeriksakan kesehatan. Sehingga keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan yang ada di Kecamatan Malalayang Kota Manado selanjutnya kondisi di masyarakat menunjukkan bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan masih ada yang berasal dari masyarakat mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas.

***Kata kunci : PKH, Pendidikan, Siswa Kurang Mampu***

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

**Pendahuluan**

Upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini, dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang di jalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2018.

PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dini dengan cara pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk jangka pendek, program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Untuk jangka panjang, melalui persyaratan yang di tentukan di harapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku yang mengarah pada perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil, serta perbaikan tingkat pendidikan anak-anak RTSM, sehingga secara berangsur-angsur rantai kemiskinan dapat diputus. Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka

pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, di harapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia, dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Untuk itu pemerintah memiliki peranan penting dalam mengimplementasi kebijakan guna menanggulangi kemiskinan yang ada. Berikut adalah fungsi-fungsi pemerintahan di Indonesia antara lain yaitu: fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim di kenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, di maksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi lebih kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas di segala bidang kehidupan, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang di miliki pemerintah, maka secara perlahan masyarakat di tuntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara

internasional di kenal sebagai Program Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

Di Kota Manado sendiri masih terdapat angka kemiskinan yang cukup signifikan selang tahun 5 tahun terakhir, hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat banyaknya rumah tangga kurang mampu yang akan berimbas pada ketidak- mampuan untuk menyekolahkan anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut, sehingga dengan di berikannya bantuan PKH ini di harapkan anak-anak dapat di sekolahkan, dan PKH ini memberikan kontribusi yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan dan anak putus sekolah.

Kecamatan malalayang merupakan salah satu kecamatan yang masyarakatnya menerima bantuan program keluarga harapan dan pada pelaksanaannya belum optimal dengan= berbagai faktor

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, Peneliti mengambil lokasi atau objek penelitiannya di Kecamatan Malalayang

Fokus penelitian ini adalah kontribusi PKH untuk menunjang pendidikan siswa kurang mampu, dengan menggunakan konsep kontribusi sebagai suatu tindakan yang di adopsi menurut Soerjono Soekanto (2008) mengartikan kontibusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi,

dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”. Jadi hal ini dapat di lihat bahwa dalam focus penelitian baik berupa

1. Bantuan dana, untuk siswa kurang mampu di kecamatan Malalayang
2. Bantuan materi, untuk siswa kurang mampu di kecamatan Malalayan.

Informan penelitian ini adalah narasumber yang di anggap mampu memberikan informasi, yaitu:

1. Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Malalayang
2. Masyarakat yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan
3. Masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima PKH tetapi tidak mendapat bantuan sosial

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data.

### **Pembahasan**

Hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Manado disebutkan bahwa transmisi yang dilakukan melalui cara sebagai berikut:

“Pelaksanaan PKH ini diawali dengan pembentukan tim UPPKH daerah yang terdiri dari pengarah UPPKH, ketua UPPKH, sekretaris UPPKH, bidang data dan SPM, Bidang verifikasi, Bidang Penyaluran Bantuan, pendamping PKH dan Operator PKH. Setelah itu pemilihan dan penetapan peserta PKH yang dilakukan oleh UPPKH pusat berdasarkan data yang diperoleh pada BPS setempat yang kemudian di verifikasi kebenaran data tersebut. Setelah itu diadakan pertemuan awal guna mensosialisasikan secara detail mengenai PKH, pembayaran bantuan, pembentukan kelompok ibu penerima PKH yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi komitmen peserta penerima bantuan PKH. Program PKH sudah tersusun secara struktural mulai dari tim pelaksana di pusat sampai tim pelaksana di daerah. Proses pelaksanaan sosialisasi mengenai PKH juga dilakukan secara berjenjang dan bertahap mulai dari pelaksana pusat, daerah, sampai peserta penerima PKH. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai PKH secara mendalam”.

Sama seperti halnya rapat koordinasi yang dilakukan tim pelaksana pusat atau daerah, proses sosialisasi mengenai PKH kepada peserta PKH dilakukan dengan konsep pertemuan rutin yang dilakukan satu kali dalam sebulan. Pertemuan rutin ini dipimpin oleh pendamping PKH setiap masing-masing kecamatan. Tugas pendamping merupakan kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan PKH ini.

Pendamping merupakan pelaksana yang berinteraksi langsung dengan peserta penerima bantuan. Oleh sebab itu dengan terjalannya komunikasi yang baik dan efektif antara pendamping dengan peserta PKH maka seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program ini dapat dipahami oleh peserta penerima PKH. Sehingga bantuan ini terlaksana sesuai dengan tujuan awalnya yaitu sebagai penunjang pendidikan dan kesehatan anak.

Hasil wawancara dengan pendamping PKH Kecamatan Malalayang, Bpk.Toni R mengatakan bahwa:

“ Pertemuan rutin seluruh ketua kelompok penerima bantuan PKH Kecamatan Malalayang bertujuan untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru yang berkaitan dengan PKH. Pertemuan rutin tersebut juga mengkaji ulang tentang PKH secara detail mengenai PKH mulai dari pengertian, tujuan, kewajiban penerima serta sanksi apabila penerima bantuan tidak melakukan kewajibannya sebagai peserta PKH. Hal ini bertujuan agar penerima bantuan PKH mengerti dengan jelas mengenai PKH secara baik”.

Program Keluarga harapan ada yang sudah tepat sasaran tetapi ada juga yang belum tepat sasaran. Seperti yang dikatakan oleh ibu Lina selaku masyarakat, bahwa:

“Ada masyarakat penerima bantuan yang pada saat pertemuan untuk penerima program keluarga harapan menggunakan kendaraan, kalung emas dengan gaya yang berlebihan, sedangkan masyarakat yang memiliki komponen dari program keluarga harapan tidak mendapat bantuan tersebut”.

Program Keluarga Harapan ini dibuat oleh pemerintah dengan maksud mengurangi dan memutuskan kemiskinan, hal ini dapat dilakukan apabila manfaat yang diperoleh dari PKH ini dapat merata, pemerataan berkaitan dengan distribusi hasil atau manfaat program bagi masyarakat. Pemerataan berkaitan dengan pertanyaan apakah manfaatnya sudah merata dirasakan semua pihak. Secara umum, pendamping PKH hampir setiap hari melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan tugasnya. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan kunjungan ke UUPKH Kota, melakukan kunjungan ke peserta PKH, melakukan

pemutakhiran data mengenai jumlah ART komponen PKH, melakukan monitoring fasilitas pendidikan (fasdik), mendampingi penyaluran bantuan PKH, dan melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan (faskes). Namun, dalam laporan kegiatan dapat dilihat bahwa jadwal terhadap masing-masing kegiatan belum teratur dan tersusun setiap bulannya. Begitu pula pada bagian rencana kegiatan bulan depan yang mencantumkan kolom waktu namun tidak diisi sama sekali.

Ada beberapa rencana kegiatan yang dibuat untuk bulan depan yang ternyata tidak terealisasi seperti melakukan kunjungan ke UUPKH Kota, melakukan pemutakhiran data, dan melakukan monitoring fasdik pada bulan Oktober 2022. Pada bulan November 2022 semua rencana kegiatan terlaksana. Sedangkan pada bulan Desember 2022 tidak dilakukan monitoring fasdik. Menurut pengakuan pendamping hal ini terjadi karena mereka bekerja berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga tidak dapat diprediksi jadwal yang pasti dalam setiap kegiatan dan tidak semua kegiatan dapat dilakukan sesuai rencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, sebagaimana yang telah dideskripsikan pada bagian hasil penelitian, bahwa PKH di Kecamatan Malalayang dapat berjalan dan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendidikan anak sekolah, walaupun tidak sepenuhnya dapat

mengcover biaya pendidikan anak, namun proses dan kajian yang panjang tahap pelaksanaan PKH.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Bantuan dana untuk siswa kurang mampu di kecamatan Malalayang untuk menggunakan dana bantuan ini dalam rangka mengembangkan Pendidikan dalam pembiayaan operasional kegiatan persekolahan Bersama juga penyampaian informasi yang baik mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kecamatan Malalayang karena mereka berada di lingkungan kampus saja.
2. Program mendapat dukungan pemerintah dengan pelaksanaan program keluarga harapan di Kota Manado untuk kesejahteraan masyarakat, dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan yang menjadi titik tumpu adalah pendamping paling berperan dalam proses pelaksanaan program,

### **Saran**

1. Bantuan dana sebaiknya pendamping agar melakukan pendataan kembali dan selalu memantau atau turun ke rumah-rumah untuk melihat langsung kondisi keluarga penerima program keluarga harapan yang ada di lapangan, dan mengingatkan agar bantuan ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Pada Bantuan materi harus Memaksimalkan tugas dari pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan diharapkan lebih tanggap akan kesejahteraan keluarga miskin dan kesadaran keluarga miskin akan pentingnya menuntaskan kemiskinan. Untuk menanggulangi kemiskinan perlu adanya tekad yang kuat dari semua pihak yang terlibat, kerjasama, konsisten, dan komitmen dalam memberantas kemiskinan.

### **Daftar Pustaka**

- Bungin Burhan. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer). Jakarta : PT Rajagrafindo.
- Chambers, Robert. (1983). Rulal Development : Putting The Last First. Jakarta: Longman Scientific & Technical
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2011). Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial(PPLS) 2011. Kemensos, Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2013). Buku Pedoman Umum PKH 2013. Direktorat Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia. Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya
- Nainggolan, Togiartua, dkk. (2012). PKH Di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di 7 Provinsi. Jakarta: P3KS Press
- Pulungan, H.S. (1994). Pengentasan Kemiskinan. Medan: PT. Pustaka Widyasarana
- Siagian, Matias. (2012). Kemiskinan dan Solusi. Medan: PT. Grasindo
- Monoratama
- Soemitro, Sutiyastie dkk. (2002). Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sumber Lain:
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial.
  - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Poin Lampiran Ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan PKH.
- Insrtuksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tetang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Poin Lampiran Ke 46 Tentang Pelaksanaan Transparansi Penyuluhan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin Sebagai Peserta PKH.